



Ruang Publik Digital dan Krisis Kepercayaan Politik: Studi Netnografi Atas Tagar #BubarkanDPR di Instagram

Sry Lestari Samosir^{1*}, Septy Denso Damanik²

^{1*}Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

²Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia

Email: ^{1*}srylestaris@unimed.ac.id, ²septydenso@unimed.ac.id

Abstrak

Krisis kepercayaan politik di Indonesia semakin nyata dengan melemahnya representasi lembaga legislatif dan meningkatnya ekspresi publik di ruang digital. Media sosial, khususnya Instagram, menjadi arena penting bagi masyarakat sipil untuk menyalurkan kritik dan membangun solidaritas alternatif. Penelitian ini mengkaji dinamika ekspresi masyarakat sipil dalam ruang publik digital dengan berfokus pada penggunaan tagar #BubarkanDPR di Instagram di Indonesia. Munculnya tagar ini mencerminkan semakin besarnya krisis kepercayaan politik, di mana warga menyuarakan ketidakpuasan terhadap lembaga perwakilan melalui aktivisme digital. Dengan menggunakan pendekatan netnografi, penelitian ini menganalisis unggahan, komentar, dan interaksi warganet untuk memahami bagaimana komunitas digital membangun narasi protes, membagikan keluhan kolektif, dan memobilisasi resistensi simbolik. Data diperoleh melalui observasi sistematis dan pengkodean tematik terhadap konten yang diproduksi pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa #BubarkanDPR tidak hanya berfungsi sebagai slogan protes, tetapi juga sebagai arena solidaritas digital, tempat kritik, satire, dan tuntutan akuntabilitas berkumpul. Instagram memberi ruang bagi warga untuk melewati saluran politik formal dan memperkuat suara yang sering terpinggirkan dalam diskursus resmi. Namun, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan, seperti polarisasi, risiko pengawasan digital, serta sifat mobilisasi daring yang cenderung sementara. Dinamika ini menunjukkan peluang sekaligus keterbatasan media sosial dalam memperkuat masyarakat sipil, serta memberikan wawasan mengenai bagaimana aktivisme digital mendefinisikan ulang partisipasi politik di Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: Ruang Publik Digital, Krisis Kepercayaan Politik, Masyarakat Sipil, Aktivisme Digital, #BubarkanDPR.

Abstract

The political trust crisis in Indonesia has become increasingly evident with the weakening of legislative representation and the growing expression of public discontent in digital spaces. Social media, particularly Instagram, has emerged as an important arena for civil society to voice criticism and foster alternative forms of solidarity. This study examines the dynamics of civil society expression in the digital public sphere by focusing on the use of the hashtag #BubarkanDPR ("Abolish the Parliament") on Instagram in Indonesia. The rise of this hashtag reflects the deepening political trust crisis, as citizens articulate their dissatisfaction with representative institutions through digital activism. Using a netnographic approach, this research analyzes posts, comments, and user interactions to understand how digital communities construct narratives of protest, share collective grievances, and mobilize symbolic resistance. Data were collected through systematic observation and thematic coding of user-generated content. The findings reveal that #BubarkanDPR functions not only as a protest slogan but also as a space of digital solidarity, where criticism, satire, and demands for accountability converge. Instagram provides citizens with opportunities to bypass formal political channels and amplify voices often marginalized in official discourse. However, the study also identifies several challenges, such as polarization, risks of digital surveillance, and the tendency of online mobilization to remain temporary. These dynamics highlight both the potential and limitations of social media in strengthening civil society, while offering insights into how digital activism is reshaping political participation in contemporary Indonesia.

Keywords: *Digital Public Sphere, Political Trust Crisis, Civil Society, Digital Activism, #BubarkanDPR.*

PENDAHULUAN

Kondisi demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan gejala yang sejalan dengan tren global berupa democratic backsliding, yaitu proses kemunduran kualitas demokrasi yang terjadi secara bertahap melalui pelemahan institusi demokrasi, penyempitan ruang sipil, dan berkurangnya perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Meskipun mekanisme elektoral masih berjalan secara reguler, berbagai indikator menunjukkan adanya penurunan kualitas demokrasi substantif. *Freedom House* menempatkan Indonesia dalam kategori *partly free* dengan skor 56 dari 100, yang menunjukkan bahwa kebebasan sipil dan hak-hak politik mengalami tekanan yang semakin besar. Fenomena tersebut terlihat dari meningkatnya penggunaan instrumen hukum untuk membatasi kritik publik, maraknya kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis, menguatnya polarisasi politik, serta meluasnya praktik disinformasi yang memengaruhi kualitas ruang publik. Pada saat yang sama, survei global yang dilakukan oleh *Pew Research Center* menunjukkan kecenderungan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap praktik demokrasi, termasuk di negara-negara demokrasi berkembang. Kondisi ini mengindikasikan adanya krisis kepercayaan terhadap institusi politik formal yang menjadi fondasi utama sistem demokrasi.

Dalam situasi tersebut, masyarakat sipil menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Di satu sisi, ruang demokrasi formal mengalami berbagai pembatasan, namun di sisi lain perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi warga untuk menyampaikan aspirasi politik, membangun solidaritas, dan melakukan mobilisasi sosial. Kehadiran media sosial telah mengubah pola partisipasi politik dari yang sebelumnya terpusat pada organisasi-organisasi formal menjadi lebih terdesentralisasi, fleksibel, dan berbasis jaringan. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai sarana komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang publik alternatif tempat berlangsungnya pertarungan gagasan, negosiasi kepentingan, serta pembentukan identitas politik. Dalam konteks ini, masyarakat sipil memanfaatkan berbagai platform digital untuk mempertahankan ruang partisipasi ketika saluran-saluran politik formal dianggap tidak lagi mampu mengakomodasi kepentingan publik secara memadai.

Namun demikian, peran media sosial dalam demokrasi bersifat ambivalen. Di satu sisi, platform digital memungkinkan perluasan partisipasi politik dan memperkuat kemampuan masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan terhadap kekuasaan. Di sisi lain, media sosial juga berpotensi memperkuat polarisasi, menyebarkan misinformasi, dan menciptakan segregasi politik di ruang digital. Merlyna Lim (2017) melalui konsep *algorithmic enclaves* menjelaskan bahwa algoritma media sosial cenderung mengelompokkan pengguna ke dalam ruang-ruang komunikasi yang homogen sehingga memperkuat identitas kelompok sekaligus mengurangi interaksi dengan pandangan yang berbeda. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan yang memungkinkan emosi politik berkembang secara intensif dan mempercepat penyebaran narasi tertentu. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Judijanto et al. (2024) yang menunjukkan bahwa politik identitas dan intensitas penggunaan media sosial berpengaruh terhadap partisipasi politik digital, tetapi pada saat yang sama juga meningkatkan risiko polarisasi dan misinformasi dalam interaksi daring.

Perkembangan aktivisme digital di Indonesia menunjukkan bahwa media sosial terus menjadi arena penting bagi konsolidasi masyarakat sipil. Pada periode 2019–2024, berbagai gerakan digital muncul melalui penggunaan tagar politik sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintah maupun lembaga negara. Memasuki tahun 2025, pola mobilisasi digital mengalami perkembangan yang lebih beragam melalui penggunaan simbol-simbol visual yang mudah direproduksi dan disebarluaskan. Kampanye #IndonesiaGelap dengan dominasi warna hitam, penggunaan foto profil *Brave Pink* dan *Hero Green* dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, serta pemanfaatan simbol budaya populer seperti karakter anime *One Piece* menunjukkan bahwa aktivisme digital semakin mengandalkan strategi komunikasi visual untuk membangun solidaritas kolektif. Simbol-simbol tersebut memungkinkan partisipasi yang lebih luas karena dapat digunakan oleh individu yang tidak terlibat secara langsung dalam aksi lapangan, tetapi tetap ingin menunjukkan dukungan terhadap suatu gerakan sosial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa masyarakat sipil terus mengembangkan bentuk-bentuk ekspresi baru sebagai respons terhadap perubahan lingkungan politik dan digital.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara media sosial, partisipasi politik, dan aktivisme digital di Indonesia. Hapsari, Sabiq, dan Sobandi (2024) menunjukkan bahwa tagar #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga digunakan sebagai bentuk protes terhadap praktik dinasti politik dan dugaan nepotisme yang dianggap mencederai prinsip demokrasi. Penelitian Lia (2021) menemukan bahwa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Instagram menghasilkan dinamika

demokrasi virtual yang ditandai dengan meningkatnya ujaran kebencian dan ekspresi frustrasi publik terhadap elite politik. Penelitian Saepudin, Sumara, dan Asriani (2018) memperlihatkan bagaimana organisasi mahasiswa memanfaatkan Instagram sebagai ruang publik digital untuk menyampaikan kritik dan mengorganisasi aksi kolektif. Sementara itu, Iskandar, Hidayat, dan Priyatna (2021) menunjukkan bahwa lembaga politik seperti DPR RI juga menggunakan Instagram sebagai instrumen komunikasi krisis untuk mempertahankan legitimasi dan mengelola persepsi publik selama kontroversi kebijakan berlangsung.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada aktivisme digital yang bertujuan mengkritik kebijakan pemerintah, mengawasi perilaku elite politik, atau mendorong reformasi institusional. Gerakan-gerakan tersebut pada dasarnya masih beroperasi dalam kerangka demokrasi representatif karena tuntutan yang diajukan berorientasi pada perbaikan sistem yang ada. Dengan kata lain, media sosial digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat fungsi kontrol masyarakat terhadap institusi politik tanpa mempertanyakan keberadaan institusi tersebut secara mendasar. Di sinilah terdapat perbedaan penting dengan fenomena yang muncul pada tahun 2025 melalui tagar #BubarkanDPR. Fenomena #BubarkanDPR merepresentasikan bentuk ekspresi politik yang berbeda secara fundamental dibandingkan gerakan-gerakan tagar sebelumnya. Jika #MosiTidakPercaya dan #MahkamahKeluarga menyoroti praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang, maka #BubarkanDPR secara langsung mempertanyakan legitimasi DPR sebagai lembaga representasi politik. Pergeseran ini menunjukkan transformasi dari kritik terhadap kebijakan dan aktor politik menuju kritik terhadap institusi demokrasi itu sendiri. Fenomena tersebut tidak lagi sekadar mencerminkan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atau anggota legislatif, tetapi mengindikasikan krisis kepercayaan yang lebih mendalam terhadap mekanisme representasi politik formal. Karakteristik ini menjadikan #BubarkanDPR sebagai fenomena yang penting untuk dikaji karena menunjukkan eskalasi baru dalam hubungan antara masyarakat sipil dan institusi demokrasi di Indonesia.

Selain menunjukkan transformasi bentuk kritik politik, fenomena #BubarkanDPR juga relevan untuk dipahami melalui perspektif ketahanan masyarakat sipil (*civil society resilience*). Konsep ini merujuk pada kemampuan masyarakat sipil untuk beradaptasi, bertahan, dan mengembangkan strategi baru dalam menghadapi tekanan politik, pembatasan ruang sipil, maupun dominasi kekuasaan negara. Dalam konteks *democratic backsliding*, ketahanan masyarakat sipil tidak hanya ditunjukkan melalui keberadaan organisasi formal, tetapi juga melalui kemampuan warga membangun jaringan solidaritas, menciptakan narasi alternatif, dan mempertahankan ruang partisipasi politik melalui media digital. Munculnya berbagai simbol, tagar, dan bentuk ekspresi visual pada tahun 2025 menunjukkan bahwa masyarakat sipil Indonesia terus melakukan inovasi dalam praktik advokasi dan perlawanan politik. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana tagar #BubarkanDPR dikonstruksikan dan dimaknai sebagai bentuk aktivisme digital di Instagram; dan (2) bagaimana aktivisme digital melalui tagar #BubarkanDPR merefleksikan ketahanan masyarakat sipil (*civil society resilience*) dalam menghadapi kecenderungan *democratic backsliding* di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan netnografi untuk memahami dinamika aktivisme digital dan solidaritas masyarakat sipil yang berkembang melalui tagar #BubarkanDPR di Instagram. Netnografi dipilih karena memungkinkan peneliti mengamati interaksi, narasi, dan praktik komunikasi yang terbentuk secara alami dalam ruang digital tanpa melakukan intervensi langsung terhadap partisipan (Kozinets, 2020; Asri, 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi nonpartisipan terhadap unggahan publik yang menggunakan tagar #BubarkanDPR di Instagram selama periode Agustus 2025. Peneliti menelusuri tagar tersebut menggunakan fitur pencarian Instagram dan mendokumentasikan unggahan yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang dikumpulkan berupa poster digital, meme politik, narasi teks, video singkat, serta komentar pengguna yang mencerminkan pandangan mengenai DPR, demokrasi, dan gerakan protes digital.

Pemilihan data dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan relevansi isi unggahan terhadap tujuan penelitian. Unggahan yang tidak berkaitan langsung dengan kritik terhadap DPR atau tidak memuat diskusi mengenai isu demokrasi dan representasi politik tidak dimasukkan ke dalam analisis. Setiap data didokumentasikan melalui tangkapan layar dan pencatatan informasi pendukung seperti tanggal unggahan, bentuk konten, dan pola interaksi yang muncul dalam kolom komentar. Analisis data menggunakan analisis tematik. Peneliti membaca dan menelaah seluruh data secara berulang untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam percakapan digital. Selanjutnya dilakukan proses pengodean, pengelompokan kategori, dan penafsiran makna untuk menemukan pola-pola utama yang berkaitan dengan krisis legitimasi DPR, solidaritas digital, kritik terhadap oligarki politik, serta dinamika demokrasi digital di Indonesia. Penelitian ini memperhatikan prinsip etika netnografi dengan hanya menggunakan data yang berasal dari akun publik.

Untuk melindungi privasi pengguna media sosial, identitas akun yang dikutip dalam penelitian disamarkan dan tidak ditampilkan secara langsung. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan partisipan serta menghindari potensi dampak negatif terhadap pengguna yang terlibat dalam diskusi mengenai isu politik yang sensitif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Penggunaan Tagar #BubarkanDPR

Berdasarkan penelusuran pada Instagram, terdapat lebih dari 25,6 ribu unggahan yang menggunakan tagar #BubarkanDPR. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa tagar ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda teknis dalam pengelompokan konten, tetapi juga menjadi simbol kolektif yang merepresentasikan akumulasi ketidakpuasan publik terhadap lembaga legislatif. Dominasi unggahan dalam bentuk poster digital dengan warna-warna kontras seperti merah, hitam, dan hijau memperlihatkan penggunaan simbol visual yang kuat untuk membangun narasi perlawanan. Warna merah sering diasosiasikan dengan situasi darurat dan perlawanan, warna hitam melambangkan duka atau krisis, sedangkan warna hijau digunakan untuk merepresentasikan harapan perubahan. Kombinasi simbol tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik digital tidak hanya dibangun melalui teks, tetapi juga melalui konstruksi visual yang mampu membangkitkan perhatian dan emosi audiens.

Sebagian besar unggahan menampilkan citra massa demonstrasi, asap flare, serta ajakan mengikuti aksi kolektif. Kehadiran elemen-elemen tersebut menunjukkan bahwa media sosial tidak lagi sekadar menjadi ruang penyebaran informasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana mobilisasi politik. Dalam konteks ini, Instagram berperan sebagai infrastruktur komunikasi yang menghubungkan pengalaman protes di ruang fisik dengan partisipasi di ruang digital. Individu yang tidak hadir secara langsung dalam demonstrasi tetap dapat terlibat melalui penyebaran ulang konten, penggunaan tagar, maupun partisipasi dalam diskusi daring. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Castells (2015) mengenai *networked social movements*, yaitu gerakan sosial yang berkembang melalui jaringan komunikasi digital dan memungkinkan terbentuknya solidaritas kolektif tanpa harus bergantung pada struktur organisasi formal.

Selain poster aksi, ditemukan pula konten yang memuat narasi panjang mengenai politik dinasti, korupsi, rendahnya akuntabilitas DPR, serta berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Kehadiran narasi argumentatif tersebut menunjukkan bahwa penggunaan tagar #BubarkanDPR tidak semata-mata didorong oleh luapan emosi, tetapi juga disertai upaya membangun justifikasi rasional terhadap kritik yang disampaikan. Dalam perspektif demokrasi deliberatif Habermas (1989), kondisi ini dapat dipahami sebagai upaya masyarakat membangun ruang publik alternatif yang memungkinkan warga mendiskusikan persoalan politik di luar saluran formal negara. Kolom komentar yang dipenuhi tanggapan, sanggahan, maupun dukungan memperlihatkan adanya proses pertukaran gagasan yang menunjukkan fungsi deliberatif media sosial.

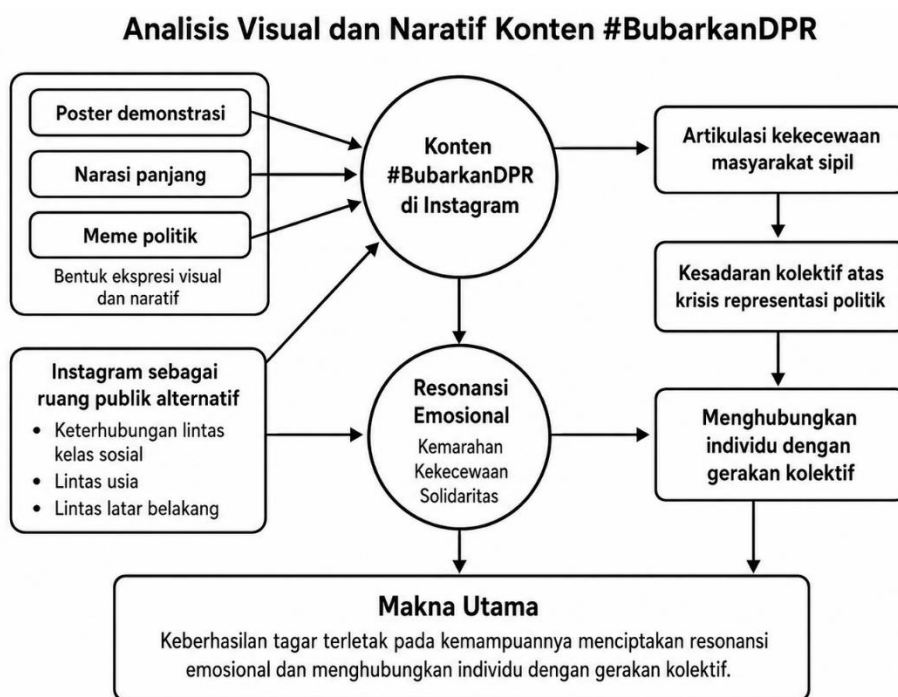
Meskipun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa tingginya interaksi pada unggahan tertentu sering kali dipengaruhi oleh muatan emosional yang kuat. Konten yang menampilkan kemarahan, kekecewaan, dan sindiran terhadap DPR cenderung memperoleh perhatian lebih besar dibandingkan unggahan yang bersifat informatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa ruang publik digital tidak sepenuhnya beroperasi dalam logika deliberasi rasional sebagaimana dibayangkan Habermas. Sebaliknya, fenomena #BubarkanDPR lebih mencerminkan terbentuknya *affective publics* sebagaimana dijelaskan oleh Papacharissi (2015), yaitu jaringan publik yang dipersatukan oleh emosi kolektif yang beredar melalui media sosial. Dalam konteks ini, kemarahan terhadap DPR menjadi perekat sosial yang menyatukan pengguna dari latar belakang yang berbeda ke dalam satu identitas politik bersama.

Temuan lain yang menarik adalah penggunaan budaya populer sebagai strategi komunikasi politik. Berbagai unggahan memanfaatkan ilustrasi bergaya komik, meme politik, satire, dan simbol-simbol populer untuk menyampaikan kritik terhadap DPR. Strategi ini menunjukkan adanya adaptasi gerakan digital terhadap karakteristik media sosial yang lebih mengutamakan konten visual, singkat, dan mudah dibagikan. Penggunaan humor dan ironi tidak mengurangi substansi kritik yang disampaikan, tetapi justru memperluas jangkauan pesan kepada kelompok muda yang menjadi pengguna dominan Instagram. Dengan demikian, budaya populer berfungsi sebagai medium artikulasi politik yang menjembatani isu-isu demokrasi dengan bahasa komunikasi yang lebih dekat dengan keseharian pengguna media sosial.

Di sisi lain, tidak semua unggahan menunjukkan dukungan tanpa syarat terhadap tuntutan radikal yang terkandung dalam tagar #BubarkanDPR. Beberapa konten justru mengingatkan publik mengenai kompleksitas sistem politik dan risiko yang mungkin muncul dari tuntutan yang bersifat ekstrem. Misalnya, unggahan yang mengkritik gagasan pergantian kekuasaan secara instan memperlihatkan adanya refleksi

kritis di dalam gerakan itu sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi arena mobilisasi perlawanan, tetapi juga ruang negosiasi makna yang mempertemukan berbagai perspektif. Dengan kata lain, solidaritas yang terbentuk di sekitar tagar #BubarkanDPR tidak bersifat homogen, melainkan terdiri atas beragam posisi politik yang saling berinteraksi, berdebat, dan membentuk pemahaman kolektif mengenai kondisi demokrasi Indonesia.

Bagan 1 memperlihatkan bahwa motif penggunaan tagar #BubarkanDPR berakar pada akumulasi ketidakpuasan terhadap kinerja DPR, persepsi mengenai dominasi oligarki politik, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap mekanisme representasi formal. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tagar ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unggahan yang beredar. Yang lebih penting adalah kemampuannya menciptakan resonansi emosional dan membangun solidaritas digital di antara pengguna media sosial. Dalam perspektif ketahanan masyarakat sipil (*civil society resilience*), fenomena ini menunjukkan bahwa ketika saluran representasi formal dianggap tidak efektif, masyarakat akan mencari ruang alternatif untuk menyuarakan aspirasi dan membangun identitas kolektif. Oleh karena itu, #BubarkanDPR tidak hanya mencerminkan ekspresi protes digital, tetapi juga menjadi indikator bagaimana masyarakat sipil beradaptasi dan mempertahankan kapasitas kritiknya di tengah menguatnya kecenderungan *democratic backsliding* dalam demokrasi Indonesia.



Bagan 1. Motif Penggunaan Tagar #BubarkanDPR

Bagan 1 memperlihatkan bahwa motif penggunaan tagar #BubarkanDPR berakar pada akumulasi ketidakpuasan terhadap kinerja DPR, persepsi mengenai dominasi oligarki politik, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap mekanisme representasi formal. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan tagar ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya unggahan yang beredar. Yang lebih penting adalah kemampuannya menciptakan resonansi emosional dan membangun solidaritas digital di antara pengguna media sosial. Dalam perspektif ketahanan masyarakat sipil (*civil society resilience*), fenomena ini menunjukkan bahwa ketika saluran representasi formal dianggap tidak efektif, masyarakat akan mencari ruang alternatif untuk menyuarakan aspirasi dan membangun identitas kolektif. Oleh karena itu, #BubarkanDPR tidak hanya mencerminkan ekspresi protes digital, tetapi juga menjadi indikator bagaimana masyarakat sipil beradaptasi dan mempertahankan kapasitas kritiknya di tengah menguatnya kecenderungan *democratic backsliding* dalam demokrasi Indonesia.

Motif Penggunaan Tagar #BubarkanDPR

Motif penggunaan tagar #BubarkanDPR di Instagram merefleksikan ekspresi politik publik yang berakar pada krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif. Berbagai unggahan yang beredar memperlihatkan kekecewaan mendalam masyarakat terhadap DPR yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan elite politik dibandingkan kepentingan rakyat. Narasi yang muncul berulang kali menyoroti isu korupsi, rendahnya kehadiran anggota DPR dalam sidang, lemahnya fungsi pengawasan, serta produk

hukum yang dianggap tidak mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai ruang alternatif bagi warga untuk menyampaikan kritik ketika mekanisme representasi formal dianggap tidak lagi responsif terhadap kebutuhan publik. Sebagaimana dikemukakan Prihatini (2020), media sosial di Indonesia tidak hanya menjadi sarana kampanye politik, tetapi juga arena perebutan legitimasi dan pembentukan opini publik.

Secara lebih mendalam, penggunaan tagar #BubarkanDPR dapat dipahami sebagai gejala melemahnya hubungan representasional antara warga negara dan institusi politik. Ketika kritik terhadap DPR tidak lagi diarahkan pada individu tertentu, melainkan pada keberadaan institusi itu sendiri, maka persoalan yang muncul bukan sekadar ketidakpuasan terhadap kinerja politik, tetapi krisis legitimasi kelembagaan. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara demokrasi prosedural yang tetap berjalan melalui pemilu dan mekanisme formal lainnya dengan demokrasi substantif yang diharapkan masyarakat. Dalam perspektif demokrasi deliberatif Habermas (1989), kondisi tersebut mencerminkan kegagalan ruang politik formal dalam mengakomodasi komunikasi publik secara efektif, sehingga warga mencari ruang publik alternatif melalui media sosial untuk menyalurkan aspirasi dan membangun kritik kolektif terhadap kekuasaan.

Selain motif politik, penggunaan tagar #BubarkanDPR juga didorong oleh kebutuhan membangun solidaritas digital lintas kelompok. Banyak pengguna media sosial yang tidak terlibat langsung dalam aksi demonstrasi tetap berpartisipasi melalui penggantian foto profil, penyebaran ulang konten, penggunaan simbol visual, maupun unggahan meme politik. Pola ini memperlihatkan perubahan karakter partisipasi politik kontemporer yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik dalam ruang publik. Sebagaimana dijelaskan Castells (2015), gerakan sosial di era digital berkembang melalui jaringan komunikasi yang memungkinkan individu membangun identitas kolektif dan solidaritas politik tanpa harus berada dalam organisasi yang terpusat. Dalam konteks #BubarkanDPR, solidaritas digital menjadi mekanisme yang menghubungkan individu-individu yang memiliki pengalaman dan kekecewaan politik serupa ke dalam satu arus gerakan bersama.

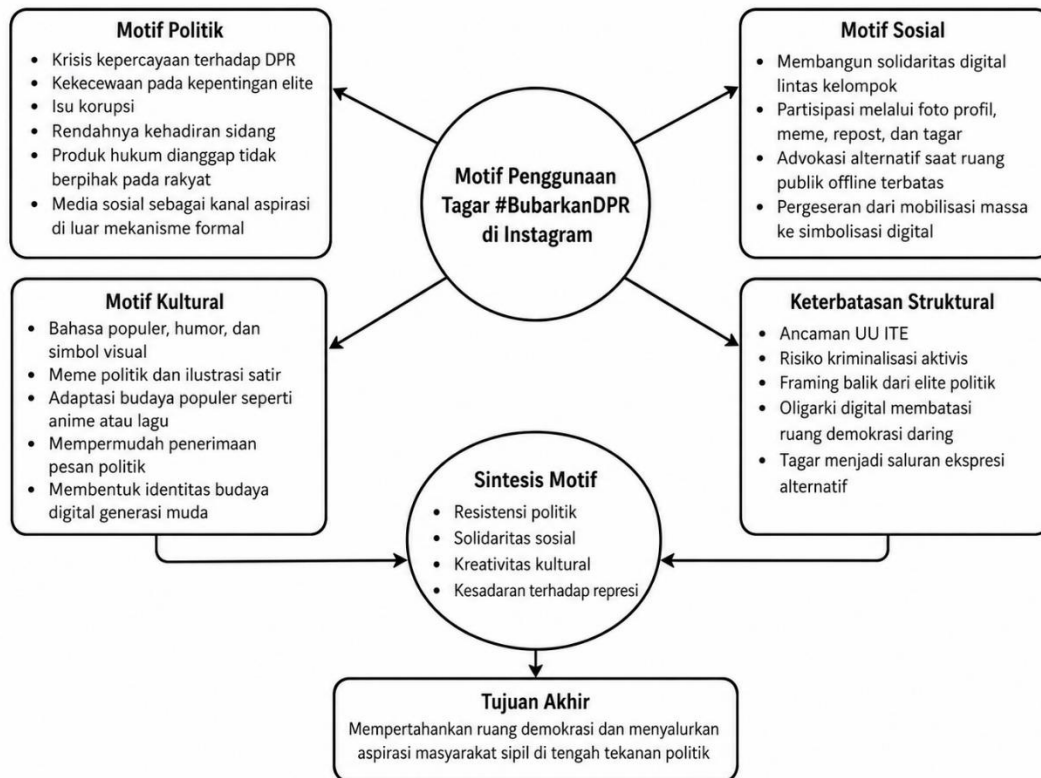
Namun demikian, solidaritas digital yang terbentuk tidak hanya didasarkan pada kesamaan argumentasi rasional, tetapi juga pada kesamaan emosi politik. Berbagai unggahan menunjukkan dominasi ekspresi kemarahan, frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpercayaan terhadap DPR. Fenomena ini menunjukkan bahwa mobilisasi dukungan terhadap tagar #BubarkanDPR lebih tepat dipahami melalui konsep *affective publics* yang dikembangkan Papacharissi (2015). Menurut konsep tersebut, media sosial memungkinkan terbentuknya jaringan publik yang dipersatukan oleh afeksi dan emosi kolektif yang terus direproduksi melalui interaksi digital. Kekuatan utama tagar #BubarkanDPR tidak hanya terletak pada substansi kritik yang disampaikan, tetapi juga pada kemampuannya membangun resonansi emosional yang memperkuat solidaritas di antara para pengguna media sosial.

Motif kultural juga menjadi faktor penting dalam penyebaran tagar #BubarkanDPR. Berbagai unggahan memanfaatkan meme, ilustrasi satir, budaya populer, serta bahasa humor untuk menyampaikan kritik politik dalam bentuk yang lebih mudah diterima oleh khalayak luas. Penggunaan simbol budaya populer menunjukkan bahwa komunikasi politik digital tidak lagi didominasi oleh bahasa formal dan retorika politik konvensional. Sebaliknya, kritik terhadap kekuasaan dikemas melalui format visual yang dekat dengan pengalaman keseharian pengguna media sosial, khususnya generasi muda. Humor dan satire dalam konteks ini berfungsi sebagai strategi komunikasi politik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik secara lebih kreatif sekaligus memperluas jangkauan pesan kepada kelompok yang sebelumnya kurang terlibat dalam diskursus politik formal.

Penggunaan tagar #BubarkanDPR tidak berlangsung dalam ruang digital yang sepenuhnya bebas. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesadaran publik terhadap berbagai keterbatasan struktural seperti ancaman kriminalisasi melalui UU ITE, framing negatif terhadap gerakan sosial, dominasi buzzer politik, serta pengaruh algoritma platform dalam menentukan visibilitas informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang publik digital tetap berada dalam relasi kuasa yang kompleks. Sebagaimana dijelaskan Tapsell (2017), ekosistem media digital Indonesia masih dipengaruhi oleh oligarki informasi yang memungkinkan aktor-aktor dengan sumber daya politik dan ekonomi yang besar memiliki kemampuan lebih besar dalam membentuk arus informasi publik.

Dalam konteks tersebut, penting untuk membedakan antara partisipasi warga yang bersifat organik (*grassroots participation*) dan mobilisasi yang bersifat terstruktur (*astroturfing*). Sebagian besar unggahan #BubarkanDPR memperlihatkan ekspresi autentik masyarakat yang lahir dari pengalaman kekecewaan terhadap DPR. Namun pada saat yang sama, ruang digital juga memungkinkan aktor-aktor tertentu memanfaatkan kemarahan publik untuk memperluas pengaruh politik mereka melalui pengelolaan jaringan akun, buzzer, maupun strategi amplifikasi pesan. Oleh karena itu, fenomena #BubarkanDPR tidak dapat

dipahami semata-mata sebagai gerakan spontan masyarakat sipil, melainkan sebagai arena kontestasi yang mempertemukan aspirasi warga, logika algoritma, dan kepentingan politik yang saling berinteraksi dalam membentuk opini publik.



Bagan 2. Motif Penggunaan Tagar #BubarkanDPR

Bagan 2 menunjukkan bahwa motif penggunaan tagar #BubarkanDPR terbentuk melalui interaksi antara faktor politik, sosial, kultural, dan struktural. Namun yang lebih penting dari sekadar klasifikasi motif tersebut adalah kenyataan bahwa seluruh faktor tersebut berakar pada satu persoalan utama, yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap kemampuan institusi demokrasi dalam menjalankan fungsi representasi politik. Dalam perspektif ketahanan masyarakat sipil (*civil society resilience*), penggunaan tagar ini menunjukkan bahwa masyarakat terus mencari ruang alternatif untuk menyalurkan aspirasi ketika saluran formal dianggap tidak lagi memadai. #BubarkanDPR tidak hanya mencerminkan ekspresi ketidakpuasan politik, tetapi juga menjadi indikator bagaimana masyarakat sipil beradaptasi, membangun solidaritas, dan mempertahankan kapasitas kritiknya di tengah menguatnya kecenderungan *democratic backsliding*, polarisasi politik, dan dominasi oligarki informasi dalam ruang publik digital Indonesia.

Ekspresi Politik Digital dalam Konten Instagram #BubarkanDPR

Fenomena penggunaan tagar #BubarkanDPR di Instagram mencerminkan dinamika yang kompleks antara krisis legitimasi politik, ekspresi emosi kolektif, dan transformasi ruang publik di era digital. Tagar ini muncul sebagai bentuk delegitimasi simbolik terhadap DPR yang dipersepsikan gagal menjalankan fungsi representasi politik secara efektif. Berbagai konten yang beredar tidak hanya memuat kritik terhadap kinerja legislatif, tetapi juga mengartikulasikan kekecewaan, kemarahan, frustrasi, dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi politik. Kritik tersebut disampaikan melalui berbagai format, mulai dari poster digital, video pendek, ilustrasi satir, hingga meme politik yang mudah direproduksi dan disebarluaskan. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi arena komunikasi politik yang memungkinkan pengalaman personal warga diubah menjadi narasi kolektif yang memiliki daya mobilisasi luas (Masduki & Wendratama, 2025).

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, kemunculan berbagai narasi kritik terhadap DPR menunjukkan adanya upaya masyarakat membangun ruang publik alternatif ketika saluran komunikasi politik formal dianggap tidak lagi responsif. Habermas (1989) menjelaskan bahwa ruang publik berfungsi sebagai arena di mana warga negara dapat mendiskusikan persoalan bersama secara rasional untuk memengaruhi proses politik. Kehadiran unggahan yang memuat argumentasi mengenai korupsi, politik dinasti, rendahnya akuntabilitas DPR, serta berbagai kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat menunjukkan

adanya praktik deliberatif yang berkembang di ruang digital. Namun, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa intensitas interaksi tidak selalu ditentukan oleh kualitas argumentasi yang dibangun. Banyak unggahan memperoleh perhatian tinggi karena kemampuannya membangkitkan emosi kolektif, terutama kemarahan dan frustrasi terhadap kondisi politik yang dianggap tidak adil.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena #BubarkanDPR tidak dapat dijelaskan hanya melalui kerangka demokrasi deliberatif. Konsep *affective publics* yang dikembangkan Papacharissi (2015) memberikan penjelasan yang lebih relevan mengenai bagaimana emosi menjadi sumber utama mobilisasi politik di media sosial. Tagar #BubarkanDPR memperlihatkan bahwa solidaritas digital terbentuk bukan semata-mata karena kesamaan argumentasi rasional, tetapi karena adanya pengalaman emosional yang dirasakan bersama oleh pengguna media sosial. Kemarahan terhadap DPR menjadi perekat yang menyatukan individu-individu dari latar belakang sosial yang berbeda ke dalam satu identitas politik kolektif. Dengan demikian, kekuatan utama tagar ini terletak pada kemampuannya membangun resonansi afektif yang mendorong partisipasi publik secara luas.

Momentum paling nyata dari ekspresi politik digital tersebut terlihat pada demonstrasi Agustus 2025, khususnya pada 25 Agustus 2025, ketika tagar #BubarkanDPR menjadi simbol utama berbagai aksi protes yang berlangsung di sejumlah daerah. Aksi yang awalnya dipicu oleh kontroversi mengenai tunjangan anggota DPR berkembang menjadi kritik yang lebih luas terhadap praktik korupsi, politik oligarkis, serta rendahnya akuntabilitas lembaga legislatif (Tempo.co, 2025a; Tempo.co, 2025b; BBC News Indonesia, 2025). Berbagai kelompok masyarakat, mulai dari mahasiswa, buruh, petani, hingga pengemudi ojek daring, terlibat dalam aksi tersebut. Mobilisasi massa berlangsung secara simultan melalui Instagram, X/Twitter, dan grup WhatsApp yang berfungsi sebagai saluran koordinasi dan penyebaran informasi (CNBC Indonesia, 2025; Detik.com, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa gerakan sosial kontemporer berkembang melalui pola hibrida yang menghubungkan aksi jalanan dengan komunikasi digital. Dalam perspektif Castells (2015), kondisi tersebut mencerminkan karakter *networked social movements*, yaitu gerakan yang memperoleh kekuatan melalui jaringan komunikasi digital yang mampu memperluas solidaritas dan mempercepat mobilisasi kolektif.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penyebaran tagar #BubarkanDPR tidak sepenuhnya berlangsung secara organik. Investigasi digital memperlihatkan adanya peran jaringan akun inti dan aktivitas buzzer yang memperkuat distribusi pesan sehingga tagar tersebut mampu mencapai lebih dari 350 ribu interaksi dalam waktu singkat (Metrosulsel, 2025). Temuan ini penting karena menunjukkan adanya perbedaan antara partisipasi warga yang bersifat organik (*grassroots participation*) dan mobilisasi yang dilakukan secara terstruktur (*astroturfing*). Partisipasi grassroots muncul dari pengalaman langsung masyarakat terhadap berbagai persoalan politik yang mereka hadapi, sedangkan astroturfing merujuk pada upaya menciptakan kesan adanya dukungan publik yang luas melalui pengelolaan jaringan akun dan strategi amplifikasi pesan. Dalam kasus #BubarkanDPR, kedua pola tersebut tampak hadir secara bersamaan. Kemarahan publik terhadap DPR merupakan ekspresi yang autentik, tetapi percepatan viralitas gerakan menunjukkan adanya aktor-aktor yang berperan dalam mengelola arus informasi dan memperbesar eksposur tagar tersebut.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa ruang publik digital tidak sepenuhnya bebas dari relasi kuasa. Sebagaimana dijelaskan Tapsell (2017), oligarki informasi di Indonesia masih memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah distribusi informasi dan pembentukan opini publik. Akibatnya, emosi publik yang muncul secara organik dapat dengan mudah dikapitalisasi oleh berbagai kepentingan politik yang memanfaatkan logika algoritma dan viralitas media sosial. Oleh karena itu, popularitas tagar #BubarkanDPR tidak hanya ditentukan oleh tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR, tetapi juga oleh kemampuan berbagai aktor dalam memanfaatkan struktur jaringan komunikasi digital untuk memperkuat narasi tertentu.

Dampak dari mobilisasi digital tersebut bersifat ambivalen. Di satu sisi, tagar #BubarkanDPR berhasil memperluas partisipasi politik masyarakat, memperkuat solidaritas digital, dan meningkatkan tekanan publik terhadap elite politik untuk memperbaiki kinerja lembaga legislatif. Namun di sisi lain, fenomena ini juga memperlihatkan meningkatnya polarisasi politik dalam ruang digital. Sebagian pengguna memandang tagar tersebut sebagai bentuk perlawanan yang sah terhadap kegagalan representasi politik, sementara kelompok lain menganggapnya sebagai ancaman terhadap stabilitas demokrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memperluas ruang partisipasi, tetapi juga menciptakan fragmentasi ruang publik yang semakin tajam. Algoritma platform cenderung mempertemukan pengguna dengan informasi yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan mereka sehingga memperkuat gejala *echo chamber* dan mengurangi peluang terjadinya dialog lintas pandangan.

Dalam perspektif ketahanan masyarakat sipil (*civil society resilience*), fenomena #BubarkanDPR menunjukkan kemampuan masyarakat untuk terus membangun ruang partisipasi politik alternatif ketika saluran representasi formal dianggap tidak lagi memadai. Tagar ini menjadi instrumen yang memungkinkan warga menyampaikan kritik, membangun solidaritas, dan mengorganisasi tekanan politik secara kolektif. Namun, ketahanan tersebut tetap berada dalam situasi yang paradoksal karena harus berhadapan dengan regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi, dominasi oligarki informasi, manipulasi algoritma, serta polarisasi politik yang semakin menguat. Oleh karena itu, #BubarkanDPR tidak hanya mencerminkan keberanian masyarakat sipil dalam mengkritik kekuasaan, tetapi juga memperlihatkan batas-batas demokrasi digital ketika partisipasi warga harus berhadapan dengan struktur kuasa yang bekerja di balik ruang komunikasi daring.

Solidaritas Digital dan Polarisasi Opini Publik dalam Gerakan #BubarkanDPR

Fenomena #BubarkanDPR memperlihatkan bagaimana Instagram tidak lagi sekadar berfungsi sebagai media penyebaran informasi politik, tetapi telah berkembang menjadi arena budaya digital tempat masyarakat memproduksi, menegosiasikan, dan menyebarkan makna politik secara kolektif. Dalam perspektif netnografi, tagar ini menjadi pintu masuk untuk memahami praktik sosial pengguna Instagram melalui unggahan, caption, komentar, meme, poster digital, repost, serta pola interaksi yang terbentuk di sekitar isu pembubaran DPR. Pada puncak demonstrasi Agustus 2025, tagar #BubarkanDPR mencapai lebih dari 25,6 ribu unggahan di Instagram dan menghasilkan ratusan ribu interaksi di berbagai platform media sosial. Tingginya intensitas partisipasi tersebut menunjukkan bahwa ekspresi politik warga tidak lagi terbatas pada ruang formal maupun aksi jalanan, tetapi juga berlangsung dalam ruang digital yang memungkinkan kritik, emosi, dan solidaritas diproduksi secara masif dan berkelanjutan.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif Habermas (1989), media sosial dapat dipahami sebagai ruang publik alternatif yang memungkinkan warga mendiskusikan persoalan politik di luar institusi formal negara. Berbagai unggahan yang mengkritik DPR memperlihatkan upaya masyarakat untuk membangun opini publik melalui pertukaran informasi, argumentasi, dan pengalaman politik. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa interaksi yang berkembang dalam tagar #BubarkanDPR tidak sepenuhnya mengikuti logika deliberasi rasional. Sebagian besar percakapan justru didorong oleh ekspresi kemarahan, frustrasi, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga legislatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Instagram tidak hanya berfungsi sebagai ruang diskusi politik, tetapi juga sebagai arena pembentukan identitas dan solidaritas berbasis emosi.

Fenomena tersebut sejalan dengan konsep *affective publics* yang dikemukakan Papacharissi (2015), yaitu terbentuknya jaringan publik yang dipersatukan oleh emosi kolektif yang beredar melalui media sosial. Dalam konteks #BubarkanDPR, solidaritas digital tidak lahir semata-mata karena kesamaan pandangan politik, tetapi juga karena adanya pengalaman emosional yang dirasakan bersama oleh pengguna media sosial. Kemarahan terhadap korupsi, kekecewaan terhadap representasi politik, dan frustrasi terhadap proses demokrasi menjadi perekat yang menyatukan berbagai kelompok sosial ke dalam satu identitas kolektif. Meme, poster digital, ilustrasi satir, video pendek, serta aktivitas repost berfungsi sebagai medium yang mereproduksi emosi tersebut sehingga dapat menyebar secara luas dan menciptakan rasa kebersamaan di antara para pengguna.

Solidaritas digital yang terbentuk melalui tagar #BubarkanDPR menunjukkan karakteristik gerakan sosial jaringan (*networked social movements*) sebagaimana dijelaskan Castells (2015). Partisipasi tidak bergantung pada struktur organisasi yang hierarkis, melainkan berkembang melalui konektivitas antar pengguna yang saling berbagi informasi, simbol, dan narasi politik. Mahasiswa, buruh, petani, masyarakat urban, influencer, aktivis, hingga media alternatif berperan sebagai simpul-simpul komunikasi yang memperluas jangkauan pesan dan memperkuat legitimasi gerakan. Temuan ini juga sejalan dengan gagasan Gerbaudo (2012) mengenai *choreography of assembly*, yaitu bagaimana media sosial mampu mengoordinasikan emosi dan tindakan kolektif sehingga individu merasa menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar meskipun tidak saling mengenal secara langsung. Dengan demikian, solidaritas digital dalam #BubarkanDPR tidak hanya tampak melalui kesamaan slogan atau penggunaan tagar, tetapi juga melalui terbentuknya identitas politik bersama yang menghubungkan ruang digital dengan aksi kolektif di ruang fisik.

Namun demikian, solidaritas digital tersebut tidak hadir tanpa ketegangan. Penelitian ini menemukan bahwa ruang percakapan yang terbentuk di sekitar tagar #BubarkanDPR juga memperlihatkan polarisasi opini publik yang cukup tajam. Kelompok yang mendukung gerakan memandang tagar tersebut sebagai bentuk perlawanan yang sah terhadap krisis representasi politik, sedangkan kelompok yang menolaknya menganggap tuntutan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi dan tatanan konstitusional.

Perbedaan pandangan tersebut tidak selalu berkembang menjadi dialog yang produktif, melainkan sering berubah menjadi pertentangan identitas yang memperkuat batas simbolik antara kelompok pendukung dan kelompok penentang gerakan.

Polarisasi tersebut diperkuat oleh karakteristik algoritma media sosial yang cenderung membentuk *echo chamber*, yaitu lingkungan informasi yang mempertemukan pengguna dengan konten yang sesuai dengan keyakinan mereka sendiri (Cinelli et al., 2020). Akibatnya, pengguna lebih sering terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan kelompoknya dibandingkan informasi yang menawarkan perspektif berbeda. Dalam konteks #BubarkanDPR, kondisi ini menyebabkan narasi tertentu memperoleh dominasi yang kuat, sementara pandangan alternatif sering kali terpinggirkan atau diposisikan sebagai ancaman terhadap identitas kelompok. Oleh karena itu, ruang digital tidak dapat dipahami sebagai arena netral, melainkan sebagai ruang sosial yang secara simultan memproduksi solidaritas dan konflik.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa solidaritas digital yang terbentuk tidak seluruhnya bersifat organik. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penyebaran tagar #BubarkanDPR turut diperkuat oleh aktivitas akun-akun inti dan buzzer yang membantu memperluas distribusi pesan. Kondisi ini menunjukkan adanya pertemuan antara partisipasi warga yang bersifat autentik (*grassroots participation*) dengan mobilisasi yang lebih terstruktur (*astroturfing*). Partisipasi *grassroots* muncul dari pengalaman nyata masyarakat terhadap berbagai persoalan politik yang mereka hadapi, sedangkan *astroturfing* beroperasi melalui pengelolaan jaringan komunikasi yang bertujuan memperbesar eksposur dan membentuk persepsi mengenai besarnya dukungan publik. Dalam kasus #BubarkanDPR, kedua pola tersebut hadir secara bersamaan sehingga memperlihatkan bahwa ruang digital merupakan arena yang mempertemukan aspirasi warga dengan kepentingan politik yang lebih luas.

Situasi tersebut mengonfirmasi argumentasi Tapsell (2017) mengenai oligarki informasi di Indonesia. Meskipun media sosial membuka peluang partisipasi yang lebih luas, distribusi informasi tetap dipengaruhi oleh aktor-aktor yang memiliki sumber daya politik, ekonomi, dan teknologi yang lebih besar dibandingkan warga biasa. Akibatnya, emosi publik yang muncul secara organik dapat dengan mudah dikapitalisasi atau diarahkan untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, kekuatan solidaritas digital dalam gerakan #BubarkanDPR tidak hanya ditentukan oleh tingginya partisipasi masyarakat, tetapi juga oleh struktur kekuasaan yang bekerja di balik sirkulasi informasi digital.

Dalam perspektif ketahanan masyarakat sipil (*civil society resilience*), fenomena #BubarkanDPR memperlihatkan kemampuan masyarakat untuk terus membangun ruang partisipasi politik alternatif ketika saluran representasi formal dianggap tidak lagi memadai. Tagar ini menjadi medium yang memungkinkan warga mengartikulasikan kritik, membangun identitas kolektif, dan memperluas solidaritas politik di tengah kecenderungan *democratic backsliding* yang semakin menguat. Namun, ketahanan tersebut tetap berada dalam situasi yang ambivalen karena harus berhadapan dengan polarisasi, manipulasi algoritma, dominasi oligarki informasi, serta berbagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Dengan demikian, #BubarkanDPR tidak hanya memperlihatkan kemampuan masyarakat sipil dalam memanfaatkan ruang digital sebagai arena resistensi politik, tetapi juga menunjukkan batas-batas demokrasi digital ketika partisipasi warga harus berhadapan dengan struktur kuasa yang terus berupaya mengendalikan arus informasi dan pembentukan opini publik.

KESIMPULAN

Fenomena #BubarkanDPR bukan sekadar luapan emosional publik, tetapi cerminan mendalam dari krisis legitimasi lembaga legislatif dan kegagalan struktural demokrasi Indonesia. Gerakan ini menunjukkan bahwa solidaritas digital tumbuh dari akumulasi kekecewaan panjang terhadap DPR yang dianggap lebih sibuk mengurus kepentingan oligarki politik ketimbang aspirasi rakyat. Media sosial memang menyediakan ruang artikulasi alternatif, namun solidaritas yang lahir di dalamnya justru sekaligus memperlihatkan paradoks: ia mampu memobilisasi ribuan orang, tetapi juga rawan dikapitalisasi oleh buzzer politik yang memperdalam polarisasi. Inilah akar masalah: demokrasi digital di Indonesia masih dikuasai oleh logika algoritma dan patronase politik, sehingga ruang sipil yang seharusnya bebas justru sering dimonopoli oleh aktor-aktor dengan modal ekonomi dan politik lebih besar.

Implikasi dari dinamika ini jelas bahwa jika ruang digital terus dibiarkan dikuasai oleh oligarki informasi dan algoritma yang memihak, maka gerakan solidaritas seperti #BubarkanDPR hanya akan berulang sebagai siklus kemarahan sesaat tanpa menghasilkan perubahan struktural. Demokrasi akan terus dipertontonkan dalam bentuk prosedural, tetapi kehilangan substansi karena tidak mampu menyalurkan aspirasi rakyat secara bermakna. Krisis ini bukan semata masalah komunikasi politik, melainkan masalah tata kelola kekuasaan yang menutup ruang deliberasi publik dan memosisikan masyarakat sipil sekadar

sebagai objek mobilisasi, bukan subjek pengambil keputusan. Rekomendasi yang perlu ditegaskan adalah perlunya reorientasi radikal dalam tata kelola politik digital. Pertama, DPR dan pemerintah harus berhenti memandang kritik publik sebagai ancaman, melainkan sebagai koreksi yang melekat dalam demokrasi. Transparansi kebijakan, pembatasan tunjangan politik yang berlebihan, dan mekanisme akuntabilitas berbasis partisipasi digital harus dijalankan untuk memulihkan kepercayaan publik. Kedua, masyarakat sipil perlu melampaui praktik simbolik semata, dengan mengorganisasi solidaritas digital ke dalam gerakan politik yang lebih terstruktur dan berkesinambungan. Solidaritas yang tidak diikuti konsolidasi akan mudah dikalahkan oleh polarisasi dan kooptasi. Ketiga, akademisi dan media harus memperkuat riset kritis tentang demokrasi digital, tidak hanya memotret fenomena viral, tetapi juga membongkar relasi kuasa di balik algoritma, buzzer, dan ekonomi politik media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Denny Januar, and Eriyanto Eriyanto. 2021. "Political Polarization and Selective Exposure of Social Media Users in Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24 (3): 268–83.
- Aminudin, Amin. 2025a. "The Echo Chamber Phenomenon on Instagram Social Media in the Case of the Revision of the 2024 PILKADA Law." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* 23 (1): 868–78.
- . 2025b. "The Echo Chamber Phenomenon on Instagram Social Media in the Case of the Revision of the 2024 PILKADA Law." *Pakistan Journal of Life and Social Sciences* 23 (1): 868–78.
- Asri, Nur. 2021. "Metode Netnografi: Pendekatan Kualitatif Dalam Memahami Budaya Pengguna Media Sosial." Remaja Rosdakarya.
- BBC News Indonesia. (2025, August 26). n.d. "Kerusuhan Demo Bubarkan DPR: Ribuan Orang Turun Ke Jalan." Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr5rj1pv1ppo>.
- Castells, Manuel. 2015. *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. John Wiley & Sons.
- Cinelli, Matteo, Gianmarco De Francisci Morales, Alessandro Galeazzi, Walter Quattrociocchi, and Michele Starnini. 2020. "Echo Chambers on Social Media: A Comparative Analysis." *ArXiv Preprint ArXiv:2004.09603*.
- CNBC Indonesia. (2025, September 7). n.d. "12 Daftar Demonstrasi Di RI Sepanjang 2025, Ini Tuntutannya." Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250907081017-128-664740/12-Daftar-Demonstrasi-Di-Ri-Sepanjang-2025-Ini-Tuntutannya>.
- Detik.com. (2025, August 28). n.d. "Lini Masa Demo Agustus 2025: Dari Joget DPR Hingga Rumah Sahroni Dijarah. ." Retrieved from <https://www.detik.com/jabar/berita/d-8088075/lini-masa-demo-agustus-2025-dari-joget-dpr-hingga-rumah-sahroni-dijarah>.
- Freedom House. n.d. "Freedom in the World 2024: Indonesia." *Freedom House*. <https://freedomhouse.org>.
- Gerbaudo, Paolo. 2012. *Tweets and the Streets: Social Media and Contemporary Activism*. Pluto press.
- Habermas, J. (1989). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT Press.
- Hapsari, Mutiara Sarah, Ahmad Sabiq, and Khairu R Sobandi. 2024. "Tagar# MosiTidakPercaya Dan# MahkamahKeluarga: Peran Media Sosial Instagram Sebagai Wacana Protes Dinasti Politik Presiden Jokowi." *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 13 (1): 378–96.
- Iskandar, Indra, Dadang Rahmat Hidayat, and Centurion Chandratama Priyatna. 2021. "Strategi Komunikasi Krisis DPR RI Menggunakan Instagram Menghadapi Penolakan RUU Cipta Kerja." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 12 (2): 107–20.
- Judijanto, Loso, Hilarius Wandan, Nur Ayu, Andri Triyantoro, and Suroso Suroso. 2024. "Pengaruh Politik Identitas Dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Digital Pemilih Milenial Dan Gen Z Di Indonesia." *Sanskara Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2 (01): 24–35.
- Lia, Nik Amul. 2021. "Demokrasi Virtual Dan Hasrat Dalam Menyampaikan Ujaran Kebencian Di Media Sosial Instagram." *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam* 13 (1): 51–68.
- Lim, Merlyna. 2017. "Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia." *Critical Asian Studies* 49 (3). Taylor & Francis: 411–27.
- Masduki, and Engelbertus Wendratama. 2025. "Digital Activism for Press Freedom Advocacy in Post-Authoritarian Indonesia." *Journalism and Media* 6 (3). MDPI: 101.
- Metrosulsel. (2025, August 27). n.d. "Mengungkap Jejak Digital Di Balik Aksi 25 Agustus. ." Retrieved from <https://metrosulsel.com/blog/mengungkap-jejak-digital-di-balik-aksi-25-agustus/>.
- Papacharissi, Z. (2015). *Affective publics: Sentiment, technology, and politics*. Oxford University Press.
- Pew Research Center. (2023). n.d. "Public Dissatisfaction with Democracy in Indonesia." *Pew Research Center*. <https://pewresearch.org>.
- Prihatini, Ella S. 2020. "Women and Social Media during Legislative Elections in Indonesia." In *Women's Studies International Forum*, 83:102417. Elsevier.

- Priyowidodo, Gatut. 2022. *Monograf Netnografi Komunikasi: Aplikasi Pada Tiga Riset Lapangan*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Saepudin, Saepudin, Andry Rivan Sumara, and Dita Asriani. 2018. “Ruang Publik Virtual Dan Sikap Politik Organisasi Mahasiswa.” *Diakom: Jurnal Media Dan Komunikasi* 1 (2): 51–61.
- Saleh, Sirajuddin. 2017. “Analisis Data Kualitatif.” Pustaka Ramadhan, Bandung.
- Tapsell, Ross. 2017. *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield.
- Tempo.co. (2025a, August 25). n.d. “Kronologi Demo Memprotes DPR Hingga Meluas Berubah Penjarahan. .” Retrieved from <https://www.Tempo.Co/Politik/Kronologi-Demo-Memprotes-Dpr-Hingga-Meluas-Berubah-Penjarahan-2065182>.
- Tempo.co. (2025b, August 24). n.d. “Ini Kejadian Yang Picu Demonstrasi Bubarkan DPR. .” Retrieved from <https://www.Tempo.Co/Politik/Ini-Kejadian-Yang-Picu-Demonstrasi-Bubarkan-Dpr-2065603>.